

EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA

LAURENCIA. G . AJAWAILA

WELSON. Y. ROMPAS

FEMMY M. G. TULUSAN

Abstrak

Infrastructure development is very important for a country because it aims to improve people's welfare and increase the country's economic growth. Infrastructure will be a long-term investment for a country. Infrastructure development has become the national development program of the central government which is also carried out by local governments. Infrastructure development is carried out to advance the region and even the country because by increasing infrastructure development it can create progress in the economic and social fields of a region. This implies that in every policy making related to development there must be equity in each region. Infrastructure plays an important role as one of the driving forces for economic growth and development. The existence of adequate infrastructure is needed. Physical facilities and infrastructure, or often referred to as infrastructure, are very important parts of the community service system. Various physical facilities are vital to support various government, economic, industrial and social activities in society and government. The success of local governments can also be measured by achieving adequate infrastructure development in accordance with what is expected. Infrastructure facilities are quite important for the community to use, however, given the inadequate road infrastructure makes it difficult for people to be lazy to use these facilities. Development of an area shows a measure of the government's success. The development in question can be in the form of infrastructure as well as human development. The North Halmahera Regency government is also carrying out development in the infrastructure sector as contained in the RPJMD North Halmahera Regency 2016-2021 to improve the quality of services in the field of health, education and infrastructure, in this case the district government has made a program -program for infrastructure development such as roads, waterways and drainage.

Keywords: policy policy, infrastructure development

Abstrak

Pembangunan Infrastruktur sangat penting bagi suatu negara karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. Infrastruktur akan menjadi investasi jangka panjang bagi suatu negara. Pembangunan infrastuktur telah menjadi program pembangunan nasional dari pemerintah pusat yang juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk memajukan daerah bahkan negara karena dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur dapat menciptakan kemajuan di bidang ekonomi dan sosial suatu daerah. Hal ini mengandung arti bahwa dalam setiap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan harus ada pemerataan di setiap daerah. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan. Keberhasilan pemerintah daerah juga dapat diukur dengan tercapainya pembangunan infrastruktur yang memadai dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sarana infrastruktur menjadi hal yang cukup penting untuk digunakan masyarakat akan tetapi mengingat infrastruktur jalan yang kurang memadai menjadikan terhambatnya masyarakat malas untuk menggunakan sarana tersebut. Pembangunan sebuah wilayah menunjukkan ukuran keberhasilan pemerintah. Pembangunan yang dimaksud dapat berupa infrastruktur maupun pembangunan manusia. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pun melakukan pembangunan di bidang infrastruktur seperti yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2016-2021 untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan pendidikan dan infrasturktu dalam hal ini pemerintah kabupaten telah membuat program-program pembangunanan infrastruktur seperti jalan, saluran air, dan drainase.

Kata kunci:Evaluasi kebijakan, pembangunan infrastruktur

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia menempatkan pembangunan infrastruktur fisik sebagai suatu sektor vital dalam mencapai pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Peran pemerintah sebagai mobilisator pembangunan sangat strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi negaranya. Pada pembangunan nasional, pembangunan infrastruktur wilayah Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan mempunyai peranan penting, harus dikelola dan dikembangkan secara serius dan terus menerus untuk mewujudkan perekonomian nasional yang berkeadilan, berkesejahteraan,berkeseimbangan(pemerataan),dan berkelanjutan. Pembangunan Infrastruktur sangat penting bagi suatu negara karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. Infrastruktur akan menjadi investasi jangka panjang bagi suatu negara. Pembangunan infrastuktur telah menjadi program pembangunan nasional dari pemerintah pusat yang juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk memajukan daerah bahkan negara karena dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur dapat menciptakan kemajuan di bidang ekonomi dan sosial suatu daerah.

Pembangunan sebuah wilayah menunjukkan ukuran keberhasilan pemerintah. Pembangunan yang dimaksud dapat berupa infrastruktur maupun pembangunan manusia.pemerintah Kabupaten Halmahera Utara pun melakukan pembangunan di bidang infrastruktur seperti yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Utara tahun 2016-2021 untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan pendidikan dan infrastuktur dalam hal ini pemerintah kabupaten telah membuat program-program pembangunanan infrastruktur seperti jalan,saluran air, dan drainase. Pemerintah kecamatan tobelo juga

melaksanakan kebijakan pembangunan infrastruktur ini.. Bentuk pembangunan tentunya harus berjalan secara selaras agar mampu memberikan output berupa kesejahteraan sosial yang berkeadilan, di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara salah satunya. Dalam hal ini pemerintah daerah Kecamatan tobelo kabupaten Halmahera utara juga melakukan pembangunan infrastruktur yang merupakan program pembangunan nasional. Pemerintah daerah telah menetapkan beberapa kebijakan untuk pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk memajukan daerah Kecamatan Tobelo itu sendiri. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum Terus melakukan pembangunan saluran Drinase serta pemeliharaan dalam rangka mengatasi banjir. Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengatakan untuk Tahun anggaran 2019 telah dilakukan pembangunan drainase kurang lebih 600 meter di kecamatan Tobelo. Dana pembangunan Drainase berasal dari APBD/DAU 2019. Akan tetapi dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur ditobelo terdapat beberapa masalah terutama dibagian pusat perkotaan kecamatan Tobelo.

TINJAUAN PUSTAKA

PENELITIAN TERDAHULU

Pertama, Priska Bagali ,Mahasiswa Prodi Administrasi Negara Fisip Unsrat. Dengan judul peneitian “ Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Gosoma Kecamatan Tobelo ”. Pembangunan adalah sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Permasalahan yang peneliti peroleh penulis dalam menunjukan Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara masih

kurang dan belum bisa dikatakan baik, dikarenakan masih cukup banyak pekerjaan yang meliputi pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik.

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian dengan Penelitian Peneliti adalah : Lokasi penelitian yang berada di kecamatan Tobelo, Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Sedangkan perbedaannya adalah Fokus penelitian ini adalah peran kepala desa dalam pembangunan sedangkan penelitian peneliti adalah evaluasi kebijakan pembangunan. Yang kedua, Fifi Rorong mahasiswa prodi Administrasi Negara Fisip Unsrat dengan judul penelitian “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tolombukan Satu Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara”. Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas kepadamasyarakat secara bersama-sama untuk memecahkan berbagai persoalan. Sebagai suatu konsep dan praktek pembangunan, konsep partisipasi baru dibicarakan pada tahun 60-an ketika berbagai lembaga internasional mempromosikan partisipasi dalam praktek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Pentingnya masyarakat dalam pembangunan desa ialah untuk mengingat masyarakat setempat yang lebih mengetahui berbagai permasalahan seperti, pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang ada sehingga memudahkan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah metode penelitian, teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Perbedaannya fokus penelitian dimana di penelitian ini memiliki fokus penelitian Partisipasi masyarakat sedangkan peneliti evaluasi kebijakan pembangunan.

Yang Ketiga, Olga Y. L. Lintjewas dengan Judul Penelitian “Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan”. Kebijakan merupakan langkah-langkah yang ingin dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam memecahkan suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Anderson (Solichin Abdul Wahab, 2004) merumuskan kebijakan pemerintah sebagai berikut “langkah-langkah yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi” Sedangkan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintah Daerah sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 “adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh kegiatan penelitian telah dilaksanakan dan berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) di Kabupaten Minahasa Selatan telah berjalan dengan baik. Semua proses yang dilakukan telah sesuai pedoman yang ditetapkan. Semua mekanisme telah dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing mulai dari pembentukan tim teknis hingga seleksi kelompok penerima. Sejak program ini bergulir di Kabupaten Minahasa Selatan, (tahun 2011 - 2015), sebanyak 73 kelompok telah menerima bantuan ini dan telah dimanfaatkan untuk pengembangan usaha di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan

pemasaran hasil perikanan. Pelaksanaan program ini telah memberikan dampak dari pelaksanaan program ini. Dampak yang dirasakan produksi ikan meningkat dibandingkan sebelum menerima bantuan ini. Begitu juga dengan pendapatan, terjadi peningkatan bila dibanding dengan kondisi awal sebelum pemberian bantuan. Persamaan adalah pembahasan yg membahas evaluasi kebijakan tetapi berbeda dengan permasalahan yang terjadi di kecamatan tobelo yang mengkaji tentang evaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur.

KONSEP TEORI

Carl J Federick sebagaimana di kutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

George C Edward III dan Ira Sharjansky mengartikan kebijakan publik adalah “apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah”. Kebijakan publik itu berupa sasaran dan tujuan program-program pemerintah. Kebijakan publik itu dapat dinyatakan secara jelas dan peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat pemerintah maupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Jones memberi definisi evaluasi kebijakan sebagai suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai keberhasilan program-program pemerintah yang berbeda-beda secara tajam tentang spesifikasi obyeknya, teknik-teknik pengukuran dan metode analisisnya. Untuk melakukan evaluasi kebijakan terdapat kriteria-kriteria diantaranya menurut pendapat Dunn (di kutip

dalam Londa dan dengo 2017: 99) bahwa kriterianya adalah :

1. *Effectiveness* : Menyangkut pemberian informasi tentang sejauh mana pencapaian hasil yang dikehendaki
2. *Efficiency* : berhubungan dengan perhitungan mengenai banyaknya kesempatan yang diperoleh dalam mencapai hasil tersebut.
3. *Adequacy* : menunjukkan pencapaian hasil duhubungkan dengan pemecahan masalah yang dihadapi.
4. *Equity* : mengukur pembagian keadilan antara kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang terlibat dengan perhitungan untung dan ruginya.
5. *Responsiveness* : melihat kepuasan yang diperoleh atau dirasakan oleh kelompok-kelompok atau pihak-pihak tersebut.
6. *Appropriateness* : mempelajari apakah hasil yang dicapai betul-betul bermanfaat.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini penilit menggunakan metode kualitatif karena penelitian kualitatif ini lebih mengutamakan proses daripada hasil, artinya dalam mengumpulkan data lebih mengutamakan hasil dan akibat dari variable yang saling mempengaruhi. Menurut Moleong (2011 : 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi Pengamatan

adalah teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara tersusun atau sistematis terhadap fenomena objek penelitian. Dokumentasi dilakukan untuk mendapat data sekunder penelitian yang di dapat dari pihak-pihak atau instansi terkait dengan penelitian ini. Dilakukan dengan mencatat, menyalin, mempelajari, dan memilah data yang termuat berupa peta atau diagram maupun data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan dengan informan terkait.

PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

1. Indikator input memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang, atau infrastruktur pembantu lainnya. Indikator input yakni Sumber daya pendukung dan bahan-bahan yang dibutuhkan yang ada di kecamatan Tobelo bisa dikatakan cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kecamatan Tobelo. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Camat, Kepala Desa dan juga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan bahwa dana dan bahan-bahan lainnya yang mendukung pembangunan infrastruktur di kecamatan Tobelo bisa dikatakan cukup tersedia. Dari data yang diperoleh dalam penelitian ini, diketahui bahwa terdapat pengalokasian dana dalam rangka pembangunan infrastruktur oleh dinas PUPR di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara.
2. Proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dikecamatan Tobelo sendiri terbagi kepada beberapa program pembangunan yang dibedakan dari pelaksana dan sumber penganggaran pembangunan. Beberapa proyek pembangunan yang berjalan di kecamatan Tobelo di laksanakan berdasarkan program dari Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi, Kemudian proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing desa yang ada di kecamatan Tobelo. Adapun penganggaran yang ada bersumber dari Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah untuk proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Povinsi maupun Kabupaten, dari Alokasi Dana Desa untuk proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Desa, serta anggaran yang berasal dari pemerintah pusat salah satunya adalah pembangunan infrstruktur yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
3. Indikator *output*(hasil), memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu. Berapa penduduk miskin yang sudah tercover dalam kebijakan tertentu, demikian seterusnya. Berdasarkan hasil penelitian

mengenai pembangunan infrastruktur kecamatan Tobelo dalam kaitannya dengan hasil dari pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur diketahui bahwa pencapaian target program pembangunan infrastruktur di kecamatan Tobelo pada umumnya telah mencapai target yang ditentukan dan direncanakan.

Pembangunan infrastruktur telah dinikmati oleh masyarakat dan digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Namun demikian, ditemui bahwa belum semua masyarakat yang dapat menikmati dan mengakses hasil dari pembangunan infrastruktur yang ada, sebagian masyarakat dalam proses penelitian didapati merasa kebutuhannya belum terpenuhi dengan adanya pembangunan infrastruktur. Sekalipun begitu, didapati terdapat beberapa kemajuan yang secara perlahan memberikan kemudahan dan memfasilitasi masyarakat dalam aktivitas sosial yang ada.

4. Indikator Indikamemfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena dampak kebijakan. Apakah dalam jangka panjang penduduk miskin dapat *empowered* sehingga mampu keluar dari kungkungan kemiskinan? Apakah kerusakan lingkungan dapat diminimalisasikan dalam jangka lama? Demikian seterusnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa dampak pembangunan infrastruktur di kecamatan Tobelo dari berbagai output yang telah ada adalah peningkatan perekonomian masyarakat di setiap desa yang ada, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya harga penjualan hasil/produk usaha masyarakat, kemudian berdampak juga terhadap peningkatan arus informasi antar masyarakat yang diperoleh dari kemudahan akses, yang dapat dilihat dari adanya perputaran ekonomi

dari hasil penjualan masyarakat baik di dalam desa, antar desa dalam kecamatan, maupun ke luar kecamatan Tobelo. Kemudian dampak lain dari adanya pembangunan infrastruktur di kecamatan Tobelo yakni kegiatan sehari-hari masyarakat di masing-masing desa yang lebih efisien dari segi waktu karena dapat menempuh perjalanan lebih cepat jika dibandingkan dengan sebelum adanya pembangunan infrastruktur.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan Sebagaimana Telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sesuai dengan indikator Pengukuran Kebijakan, sebagai Berikut :

1. Indikator input yakni Sumber daya pendukung dan bahan-bahan yang dibutuhkan yang ada di kecamatan Tobelo bisa dikatakan cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kecamatan Tobelo. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Camat, Kepala Desa dan juga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan bahwa dana dan bahan-bahan lainnya yang mendukung pembangunan infrastruktur di kecamatan Tobelo bisa dikatakan cukup tersedia.
2. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kecamatan Tobelo sendiri terbagi kepada beberapa program pembangunan yang dibedakan dari pelaksana dan sumber penganggaran pembangunan. Beberapa proyek pembangunan yang berjalan di kecamatan Tobelo dilaksanakan berdasarkan program dari Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi, Kemudian proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing desa yang ada di kecamatan Tobelo.

3. Kendala yang seringkali Terjadi pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Tobelo yang dimana seringkali Pembangunan dilakukan di Atas Tanah milik masyarakat sehingga dapat memakan waktu yang cukup lama bagi Pemerintah Kecamatan araupun desa untuk melakukan Musyawarah ataupun ngosiasi agar Masyarakat dapat memberikan Tanah mereka untuk kepentingan mereka dan juga kepentingan umum di Kecamatan Tobelo. Kendala lainnya adalah masalah Dana pembangunan yang tidak bisa difokuskan kepada kecamatan Tobelo saja karena Kabupaten Halmaher Utara memiliki banyak kecamatan yang harus diperhatikan pembangunannya hal ini yang menyebabkab pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dikecamatan Tobelo belum bisa dimaksimalkan 100%
4. Dampak dari adanya pembangunan infrastruktur di kecamatan Tobelo yakni kegiatan sehari-hari masyarakat di masing-masing desa yang lebih efisien dari segi waktu karena dapat menempuh perjalanan lebih cepat jika dibandingkan dengan sebelum adanya pembangunan infrastruktur. Dampak lainnya yang terlihat dari adanya pembangunan infrastruktur adalah teratasinya masalah endapan air dan banjir dengan adanya pembangunan drainase sehingga aktivitas perekonomian masyarakat tidak terganggu.
5. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembangunan infrastruktur kecamatan Tobelo dalam kaitannya dengan hasil dari pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur diketahui bahwa pencapaian target program pembangunan infrastrur di kecamatan Tobelo pada umumnya telah mencapai target yang ditentukan dan

direncanakan. Pembangunan infrastruktur telah dinikmati oleh masyarakat dan digunakan dalam aktivitaas sehari-hari.

Saran

Mengacu Pada Hasil Penelitian ini, Maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya pembebasahan Lahan Terlebih dahulu agar masalah ini tidak menghambat jalnnya pembangunan infrastruktur Dikecamatan Tobelo
2. Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah dan negosiasi tentang lahan pembangunan infrastruktur sangat penting
3. Diperlukan Pendanaan yang lebih khusus agar pembangunan infrastruktur di kecamatan Tobelo agar dapat lebih baik
4. Perlu adanya inisiatif dari masyarakat dalam menjaga pemeliharaan pembangunan infrastruktur yang menjadi sarana publik
5. Perlu membangun hubungan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah sehingga dapat menjalankan pembangunan infrastruktur tanpa ada kendala.

DAFTAR PUSTAKA

- Bridgman, Peter, dan Davis, Glyn.2000.*The Australian policy handbook*. Australia : Allen & Unwin.
- Londa Very, Dengo Salmin.2017. *Kebijakan Publik*. Manado : Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Sam Ratulangi.

- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi penelitian kualitatif edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho D, Riant.2006. *Kebijakan Publik(Untuk Negara-Negara Berkembang)*. Jakarta : PT. Alex Media Komputindo.
- Suantono, Bambang. 2012. *Manajemen Infrastruktur dan pengembangan Wilayah*. Jakarta : UI- Press
- Sugiyono. 2007. *Metode penelitian kuantitatif dan R&D*.Bandung: Alfabeta
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik*, Intermedia Jakarta.
- Yemim renhazia. AmarAli. Yunus Sading. 2016. *Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan(PPIP) terhadap peningkatan Ekonomi masyarakat di krcamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara(studi kasus desa Kiribonde,korowou,wawopada*.Jurnal Katalogis vol.4. hlm184-196.